



Jurnal Ilmiah

KHAZANAH

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

- ✓ **Nurcholish Madjid**
Perguruan Tinggi Islam dan Rekonstruksi Tradisi Keilmuan di Masa Depan
- ✓ **Imam Bawani**
Format Pendidikan Islam di Era Perdagangan Bebas
- ✓ **Syafiq A. Mughni**
Islam dan Masalah Modernisasi di Indonesia
- ✓ **Zainuddin Maliki**
Peta Politik Nasional di Masa Depan
- ✓ **Isa Anshori**
Harapan Islam dan Indonesia terhadap Kehidupan Politik pada Era Reformasi
- ✓ **Khoirul Huda**
Akar Konflik Teologi dalam Islam
- ✓ **Mu'adz**
Penelitian : Ilmu Menurut Al - Ghazali dan Muhammad Abduh
- ✓ **Abu Sufyan**
Penelitian : Pluralisme Keberagamaan di Pemukiman Baru :
Studi Tentang Konflik dan Integrasi antara warga NU dan Muhammadiyah di Perumahan Taman Jenggala Sidoarjo.

Edisi No. 01 Tahun 1 September 1999

diterbitkan oleh
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

DAFTAR ISI

Halaman

Penaanggung Jawab
Prof. DR. H. Syaifiq H. Mughni, MA

Pemimpin Umum
Drs. H. Abu Sufyan, M.Ag
Wakil Pemimpin Umum
Drs. A. Hamid, M.Ag

Pemimpin Redaksi
Drs. Mu'adz, M.Ag

Sidang Redaksi
Isa Anshori, M. Si
Khoirul Huda, S.Ag

Sirkulasi
Drs. Moh. Amirin

Alamat Redaksi
Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo
Telpon (031) 8945444

Redaksi menerima makalah atau hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan. Tulisan di ketik pada kertas kwarto spasi ganda minimal 8 lembar

- Pengantar Redaksi
- Daftar Isi
- Perguruan Tinggi Islam dan Rekonstruksi Tradisi Keilmuan di Masa Depan
Oleh Nurchoish, Madi
- Format Pendidikan Islam di Era Perdagangan Bebas
Oleh Imam Bawani
- Islam dan Masalah Modernisasi di Indonesia
Oleh Syaifiq A. Mughni
- Peta Politik Nasional di Masa Depan
Oleh : Zainuddin, Maliki
- Harapan Islam dan Indonesia terhadap Kehidupan Politik pada Era Reformasi
Oleh Isa Anshori
- Akar Konflik Teologi dalam Islam
Oleh Khoirul Huda
- Penelitian : Ilmu Menurut Al-Ghazali dan Muhammad Abdun
Oleh Mu'adz
- Penelitian : Pluralisme Keberagaman di Pemukiman Baru : Studi Tentang Konflik dan Integrasi antara warga Nu dan Muhammadiyah di Perumahan Taman Jenggala Sidoarjo
Oleh Abu Sufyan

HARAPAN ISLAM DAN INDONESIA TERHADAP KEHIDUPAN POLITIK PADA ERA REFORMASI

Oleh : Isa Anshori^{*)}

Indonesia memang bukan negara Islam tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai kelompok mayoritas, peran politik umat Islam sebenarnya tetap sangat penting, sekalipun selalu terkandaskan dalam setiap kancah percaturan politik, terutama setiap penentuan kebijakan pemerintahan dan pemilu. Di saat berdirinya negara RI ini, dengan lapang dada "umat Islam" bersedia menghapus tujuh kata pada akhir sila pertama demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada hasil pemilu 1955 baik untuk parlemen maupun konstituante, empat partai Islam (Masyumi, penentuan wakil rakyat yang tidak menyakinkan penampilannya NU, PSII dan Perti) hanya berhasil mengumpulkan suara

sekitar 42,5%. Demikian pula dalam pemilu tahun 1971 (NU, Parmusi, PSII dan Perti), tahun 1977 dan 1982 (PPP) menunjukkan hanya mampu mencapai sekitar sepertiga dari jumlah suara, bahkan pada pemilu 1987, 1992 dan 1997 perolehan suara semakin tertinggal jauh dengan Golkar. Begitu pula pada th. 1999 ini, pemilihan umum partai-partai Islam masih kalah dengan Golkar dan paling mengejutkan tertinggal jauh dengan PDI Perjuangan. Amien Rais menyatakan, scandainya pemilu benar-benar luber pun, pada masa orba partai Islam tidak akan menjadi mayoritas.¹

Gejala minimnya peroleh suara tersebut sebenarnya bukan karena peran politik umat Islam di Indonesia semakin menurun, yang terjadi adalah adanya pergeseran orientasi di kalangan umat Islam dalam memerankan politik, disamping itu juga perbedaan ideologi umat Islam dan sistem politik² di Indonesia seperti menghendaki demikian.³

^{*)} Dosen tetap Fak. Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, alumnus FT-IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1990 dan program pasca Sarjana Univ. Airlangga, Surabaya tahun 1997.

¹ M. Amien Rais: *Cakrawala Islam di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal: V.

² Siste, politik suatu negara selalu meliputi dua suasana kehidupan, yakni : suasana kehidupan politik pemerintahan (*the governmental political sphere*) dan suasana kehidupan politik rakyat (*the socio-political sphere*). Suasana kehidupan politik pemerintah dikenal suprastruktur politik, yaitu bangunan "atas" yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang mempunyai peranan penting dalam proses kehidupan politik (pemerintahan) dan dapat diketahui dalam UUD, seperti : MPR, DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA. Sedangkan suasana kehidupan politik rakyat dikenal dengan istilah infrastruktur politik, yaitu bangunan "bawah" yang bersangkut paut dengan pengelompokan warga negara atau masyarakat menjadi berbagai macam golongan yang disebut kekuatan sosial politik. Infrastruktur ini mempunyai lima unsur, yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik dan tokoh politik. Partai politik berbeda dengan gerakan politik. Gerakan politik mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan bersifat fundamental, bahkan kadang-kadang bersifat ideologis; organisasinya kurang ketat dan tidak mengaandalkan nasib dalam pemilihan umum. Sedangkan partai politik mempunyai tujuan yang lebih luas, organisasinya ketat dan mengadakan nasibnya pada pemilu. Rahmat A; *Tata Negara*, Ganeca Exact, Bandung, 1996, h: 109 dan 115.

³ Riswandha Imawan menyebutkan, salah satu keberhasilan yang paling menonjol dari Orde Baru adalah diselenggarakannya pemilu secara berkala. Obsesi ganda Orde Baru, yakni menciptakan stabilitas politik demi pembangunan ekonomi, telah melahirkan tarikan ekonomi dan tarikan politik ke dua titik yang berbeda. Pemilihan indikator stabilitas politik, seperti rendahnya (kalau mungkin tidak adanya) demonstrasi, keresahan sosial, gerakan sparatis dan sebagainya, telah membawa politik Indonesia condong ke arah praktek otoritarianisme. Sebaliknya, pertumbuhan, jumlah investasi, dan sebagainya telah membawa suasana "liberal" ke dalam masyarakat Indonesia. Arief Budiman menggambarkan demokrasi Indonesia seperti Gelang Karet. Fleksibilitas kontrol membawa problem terhadap kehidupan politik Indonesia, terutama pada seputar pelaksanaan pemilu (batas tindakan demokratis, semi-demokratis, dan tidak demokratis menjadi kabur), penentuan wakil rakyat yang tidak menyakinkan penampilannya, dan praktek berdemokratis itu sendiri. Riswandha Imawan; *Membedah Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, h. IX-XI.

Pada proses sejarah umat Islam di Indonesia hingga kini, semakin banyak di antara umat Islam yang memahami, bahwa untuk memperjuangkan Islam tidak harus memakai simbol keislaman, dengan membentuk negara dan pemerintahan Islam (sistem khilafah bagi sunni atau imamah bagi syii'), serta membentuk atau memasuki partai Islam. Yang penting bagaimana nilai-nilai Islam bisa terumuskan dan teraplikasikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di sistem pemerintahan. Dengan orientasi inilah banyak pakar Islam yang kemudian menjadi tokoh pada berbagai konstantan pemilu, menjadi anggota DPR/MPR bahkan kabinet pemerintahan - terutama pada Orde Baru dan Kabinet Reformasi, begitu juga produk-produk konstitusi dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah mulai diwarnai oleh Islam.

Perbedaan idiologi keagamaan dan kepentingan di kalangan umat Islam nampaknya juga berimbas pada sulitnya umat Islam disatukan dalam satu partai Islam. Ini bisa dibuktikan dengan menjamurnya berbagai partai politik Islam pada orde lama dan orde reformasi, begitu juga pada orde baru sekalipun sudah disediakan satu partai Islam (PPP). Menarik untuk dicermati, bila pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib, politik melahirkan berbagai aliran teologi Islam (Khawarij, Syiah, kemudian Murjiah, Mu'tazilah, Asy Ariyah, Maturidia dan sebagainya). Maka yang terjadi kemudian, terutama pada era reformasi di Indonesia, berbagai faham keagamaan di kalangan umat

Islam melahirkan berbagai partai politik Islam, misalnya: Partai Amanat Nasional (PAN⁴), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai umat Islam (PUT) Partai Keadilan (PK) dan sebagainya.

Lalu bagaimana sebenarnya kehidupan politik yang dikehendaki oleh Islam di Indonesia pada era reformasi. Dalam Al Qur'an memang menegaskan pentingnya pemerintahan dan kekuasaan, tetapi tidak pernah memaparkan secara rinci keputusan konstitusional pemerintahan Islam. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, dalam Al Qur'an maupun Sunnah, tidak terdapat dasar pijakan bagi keputusan konstitusional baku yang melandasi teori pemerintahan (*khilafah* menurut Sunni atau *Imamah* menurut Syii). Karena itu, Ibnu Taimiyah mengajukan hukum syariah, bukan lembaga khilafah sebagai persoalan pokok dalam teori politik Islam. Kebutuhan manusia terhadap pemerintahan tidak hanya ditegaskan dalam hukum wahyu, tetapi juga diperkuat oleh hukum alam atau akal yang melibatkan manusia untuk bergabung dan menjalin kerja sama. Menurutnya, kualitas negara Islam bukan terletak keselarasannya dengan struktur konstitusional tertentu dengan khilafah, tetapi kecakapan dan kemampuannya untuk melaksana-nakan dan mewujudkan prinsip-prinsip syariah. Pemerintahan yang dikehendaki adalah yang menitik beratkan pada asas konsultasi, kope-rasi dan hubungan perjanjian melalui proses bai'ah.⁵

Nampaknya apa yang dikemukakan Ibnu

⁴ PAN sekalipun bukan berasaskan Islam, tetapi masyarakat luas menyatakan sebagai partai Islam karena mayoritas tokohnya dari Islam terutama Muhammadiyah. Begitu pula PKB yang didukung sepenuhnya oleh Abdurrahman Wahid dan dinyatakan sebagai satu-satunya penyalur aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama, pernyataan ini dikemukakan oleh Gus Dur mengingat banyaknya partai politik yang terlahirkan dari tokoh NU, seperti PNU, PKU dari partai sendiri dan sebagainya. PPP juga akhirnya menggunakan asas Islam dan berlambang gambar Ka'bah.

⁵ Khalid Ibrahim Jindan; *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h: 127-128.

Taimiyah tersebut bisa diterapkan di Indonesia, sekalipun tidak pasti demikian, mengingat kehidupan beragama yang plural dan memang Indonesia bukan negara Islam. Yang penting adalah bagaimana nilai-nilai syariat Islam menjiwai pada sistem pemerintahan di Indonesia, demikian pula pada partai politik dan gerakan politik yang dimiliki dan dilakukan oleh mayoritas umat Islam. Kehidupan politik yang dikehendaki oleh Islam adalah suasana kehidupan politik (pemerintahan maupun rakyat) yang menjamin keamanan, ketentraman, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat (QS 57:25, 22:41 dan 3:11). Sebagai penduduk mayoritas, memang umat Islam selayaknya tetap berkuasa dengan didasarkan pada profesionalitas, tetapi bukan berarti tidak melibatkan bahkan menyingkirkan fihak-fihak lain secara tidak sehat.

Prinsip utama yang harus dimiliki pemerintah maupun aktor politik menurut Islam adalah keimanan terhadap ke-Esaan dan kekuasaan Allah sebagaimana yang ditanamkan oleh para Rasul. Tidak seorangpun yang diperkenankan memberikan perintah atau membuat aturan-aturan sekehendaknya sendiri, mengakui kewajiban untuk melaksanakan perintah atau aturan seperti itu. Yang berhak adalah Allah. Pemerintah, aktor politik dan rakyat pada umumnya hanya sebagai pelaksana yang kritis saja (QS 12:40 ; 3:154 ; 16:116 ; 5:44 ; 6:50; 4:64 ; 6:89 ; 3:79).⁶

Sebagai politikus, harus mampu mempengaruhi, memobilisasi dan mendapatkan kekuasaan termasuk menguasai dan memanfaatkan sumber-sumber daya seperti tanah, pabrik, kesejahteraan, pekerjaan, organisasi, teknologi, barang dan jasa, serta media dan keahliannya⁷ dengan tetap

berdasarkan pada "hukum - hukum Allah" (*kauniyah* dan *kauliyah*) untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan pribadi atau golongan.

Pemerintahan dibentuk secara demokratis dan diselenggarakan berdasarkan konsultasi timbal balik (QS 24:55). Sifat kekhelifahan yang dijanjikan adalah kekhelifahan universal dan tidak terbatas hanya pada individu atau kelompok orang. Akibatnya, seluruh masyarakat bertanggung jawab atas urusan kenegaraan, dan dengan demikian hanya pemerintahan semacam inilah yang secara sah dapat mengemban urusan negara yang dibentuk berdasarkan kehendak rakyat dan bekerja sejalan dengan kekuasaan yang telah didelegasikan oleh masyarakat QS 3:159 ; 42:38). Dengan demikian, pendekatan terhadap rakyat harus didasarkan atas kasih sayang, simpati dan kecesaran hati. Pemerintah harus mencoba meringankan beban rakyat, memberikan jaminan bagi tegaknya keadilan, pemenuhan kebutuhan pokok sekaligus kenyamanan, kesejahteraan, kelayakan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Begitu pula partai politik dan gerakan politik di Indonesia, sekalipun sulit untuk disatukan, seharusnya berpegang teguh dan berorientasi pada sistem nilai moral tersebut. Inilah harapan Islam, sekaligus Indonesia terhadap kehidupan politik yang sudah lama diimpikan untuk bisa direalisasikan sejak masa lalu, sekarang dan mendatang.

Harapan tersebut hanya bisa terwujud bila ada nuansa pendidikan politik yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam di atas, baik melalui lembaga pendidikan jalur sekolah maupun luar sekolah. Bukan nuansa pendidikan politik aliran sebagaimana yang berkembang hingga sekarang.

⁶ Abul A'la Al-Maududi : *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Mizan, Bandung, 1995, h: 159-160.

⁷ Mumtaz Ahmad : *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Mizan, Bandung, 1996, h: 2.